

**UPAYA KANTOR PENGELOLAAN PASAR
MELAKUKAN KOORDINASI ATAS TUNGGAKAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan Guna
memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

DODI ARDINAL

TM/NIM : 2006/79284

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

ABSTRAK

DODI ARDINAL,2006/79284:UPAYA KANTOR PENGELOLAAN PASAR DALAM MELAKUKAN KOORDINASI ATAS TUNGGAKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA SOLOK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan kantor pengelolaan pasar atas tunggakan pembayaran retribusi pasar oleh pedagang di pasar raya solok. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh kantor pengelolaan pasar dan kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar sesuai dengan Surat Keputusan Retribusi(SKR) yang di tetapkan oleh Dinas Pengelolaan,Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA). Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar atas tunggakan pembayaran retribusi pasar oleh pedagang di pasar raya Kota Solok, apa saja yang menjadi kendala-kendala Kantor Pengelolaan Pasar dalam melakukan koordinasi atas tunggakan pembayaran retribusi pasar oleh pedagang di pasar raya solok, dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Kantor Pengelolaan Pasar atas tunggakan pembayaran retribusi pasar oleh pedagang pasar raya solok.

Penelitian ini memakai teori fungsi Koordinasi G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan ditentukan secara *purposive* sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Kantor Pengeloaan Pasar Dalam Melakukan Koordinasi Atas Tunggakan Pembayaran Retribusi Pasar di Kota Solok belum memberikan hasil yang optimal. Karena adanya kendala-kendala yang di hadapi Kantor Pengelolaan Pasar Kota Solok saat melakukan koordinasi. Kurangnya koordinasi yang dilakukan, terjadinya tumpang tindih saat melakukan tugas dan wewenang, kurang disiplinnya pegawai Kantor Pengelolaan pasar saat melakukan pemungutan, serta kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi sesuai dengan surat keputusan retribusi yang telah ditetapkan.

Diharapkan seluruh aparat Kantor Pengelolaan Pasar dan aparat terkait untuk dapat menyumbangkan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan koordinasi untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan agar tidak terjadinya penunggakan retribusi pasar. Diharapkan seluruh pedagang memiliki kesadaran untuk membayar retribusi pasar yang telah ditetapkan. Memberikan sanksi yang tegas kepada pedagang yang sering menunggak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA KANTOR PENGELOLAAN PASAR DALAM MELAKUKAN KOORDINASI ATAS TUNGGAKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA SOLOK”**. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada arwah Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pertama-tama penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan mendalam kepada: Ibuk Dra. Al Rafni, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ideal Putra, M. Si selaku pembimbing II yang telah berkenan dengan sabar dan sungguh-sungguh memberikan arahan, bimbingan, menyumbangkan pemikiran dan menyediakan waktu bagi penyusunan skripsi ini, hingga segala kendala dan hambatan dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Henni Muchtar, S.H. M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP.
3. Ibuk Dra. Al Rafni, M.Si. selaku pembimbing I dan, Bapak Drs. Ideal Putra M.Si. selaku pembimbing II.
4. Bapak Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si. dan Ibuk Lince Magriasti S.IP, M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran serta kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
6. Teristimewa penulis ucapan terima kasih yang dalam dan tulus dengan do'a khusuk kepada Allah SWT untuk Ayahanda dan Ibunda, Kakak Adik serta seluruh keluarga yang selalu mendo'akan penulis, memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi ini.
7. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan IAN yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata kepada Yang Maha Kuasa jualah penulis memohon dan berdoa semoga jerih payah yang diberikan kepada penulis kiranya mendapat balasan yang setimpal dari-Nya dengan harapan semoga skripsi ini dapat menjadi bukti kecil dari perjuangan yang penulis lakukan selama ini semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Serta kepada Allah yang maha kuasa penulis berserah diri, semoga diberikan jalan yang lurus dan benar untuk meniti hari esok yang lebih baik, Amin Ya Rabbal' A'lamin..

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	9
B. Kerangka Konseptual.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Informan Penelitian	34
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	35

E. Uji Keabsahan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	40
B. Temuan Khusus.....	59
C. Pembahasan	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Penunggakan Retribusi Pasar Di Kota Solok.....	4
Tabel 3.1	: Daftar Nama Informan Penelitian	34
Tabel 4.1	: Pemanfaatan Petak Toko Di Pasar Raya Solok.....	43
Tabel 4.2	: Legalitas Pemegang Hak Sewa Yang Menyewakan Kepada Pihak ketiga.....	43
Tabel 4.3	: Penempatan Toko, Kios, Peti, dan PKL Di Pasar Raya Solok.....	45
Tabel 4.4	: Inventaris Kantor Pengelolaan Pasar Solok.....	52
Tabel 4.5	: Tingkat Pendidikan Pegawai Di Kantor Pengelolaan Pasar Raya Solok.....	47
Tabel 4.6	: Komponen-Komponen Yang Melakukan Koordinasi.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1	: Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar Raya Solok.....	50

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 : Pelaksanaan Koordinasi Atas Tunggakan
Pembayaran Retribusi..... 63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Dari Kesbangpol
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Pengelolaan
Pasar Raya Solok

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya diperoleh dari penerimaan pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara. Hal demikian sebagai pembiayaan atas pengeluaran dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Demikian juga halnya pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga Pendapatan asli daerah yang relative kecil menyebabkan jalannya pembangunan di daerah masih tergantung pada pemerintah pusat. Akibat kecilnya pendapatan asli daerah dalam mendukung pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah di tuntut dan di bebaskan kepada daerah untuk dapat bekerja keras dalam rangka meningkatkan pendapatannya baik melalui peningkatan pendapatan asli daerah maupun pendapatan penerimaan lain yang sah.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan

berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan, untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 menurut pasal 5 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, menurut pasal 110 salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi itu sendiri digolongkan atas tiga

golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya.

Salah satu upaya untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari hasil retribusi pasar, dan hal tersebut akan didapatkan dengan optimalisasi pemungutan retribusi pasar oleh Kantor Pengelolaan Pasar. Apabila pemungutan retribusi pasar tidak optimal maka pendapatan tidak akan meningkat, untuk itu perlu pembenahan dalam tata kelola dalam pemungutan retribusi pasar.

Data awal yang peneliti peroleh dari observasi dan wawancara diketahui bahwa pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar Raya Solok mendapat permasalahan dalam penagihan. Wawancara awal yang peneliti lakukan di Kantor Pengelolaan Pasar Raya Solok kepada Ibuk Zarmiati SE (kasi penagihan) pada tanggal 3 Oktober 2011 mengatakan bahwa masalah yang ditemui dalam melakukan pemungutan retribusi berupa kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), sehingga kebanyakan para pedagang melakukan penunggakan. Penunggakan tersebut dapat dilihat lebih jelasnya pada table 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Penunggakan Retribusi Pasar di Kota Solok

No	Tahun	Target	Realisasi		Tunggakan		Ket
			F	%	F	%	
1	2009	855.791.738	599.999.923	70%	255.791.815	30%	Menunggak 30%
2	2010	1.102.868.190	750.999.923	68%	351.868.267	32%	Menunggak 32%
3	2011	1.259.778.200	783.895.027	62%	475.883.173	38%	Menunggak 38%

Sumber; Kantor Pengelolaan Pasar Kota Solok Tahun 2012

Tabel diatas membuktikan bahwa pemungutan retribusi tiga tahun terakhir (2009,2010,2011) terjadi peningkatan penunggakan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 penunggakan yang terjadi hanya 30%, pada tahun 2010 terjadi peningkatan tunggakan 32 %, dan pada tahun 2011 penunggakan meningkat lagi menjadi 38 %.

Penunggakan pembayaran retribusi oleh pedagang sebagaimana uraian diatas maka aparaturnya Kantor Pengelolaan Pasar Raya Solok sudah sepantasnya untuk mengevaluasi kinerjanya. Kinerja yang baik dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA),TNI, POLRI selaku Kapolpos Pasar Raya Solok. Koordinasi tersebut dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kota Solok No 3 tahun 2007 yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pasar. Salah satu koordinasi yang dilakukan seperti melakukan pemungutan retribusi dengan intensif dari pintu ke pintu. Koordinasi ini dirasa penting agar kewajiban-kewajiban pedagang dalam membayar retribusi berjalan dengan lancar. Pelaksanaan koordinasi tersebut hendaknya terpusat, berkesinambungan,terpadu, dan saling memberikan informasi yang relevan untuk

menghindari terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan wewenang saat melakukan pemungutan retribusi. Kenyataannya pelaksanaan koordinasi belum memberikan hasil yang optimal terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar. Sehingga menyebabkan masih terdapat penunggakan oleh pedagang. Disamping itu masih terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kurang optimalnya hasil yang dicapai oleh Pengelolaan Pasar Raya Solok. Di lain pihak masalah yang tidak kalah pentingnya kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi, yaitu adanya pedagang yang mangkir dari pemungutan, dan ketika pedagang didatangi aparat dalam pemungutan masih banyak para pedagang beralasan kedai baru dibuka, belum jual beli, pasar sepi dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji atau membahasnya lebih lanjut yang di sajikan melalui tulisan dalam bentuk Skripsi yang berjudul, **“UPAYA KANTOR PENGELOLAAN PASAR DALAM MELAKUKAN KOORDINASI ATAS TUNGGAKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA SOLOK”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya tugas dan fungsi Kantor Pengelolaan Pasar di Kota Solok dalam melakukan koordinasi atas tunggakan retribusi.

2. Kurang optimalnya mekanisme pemungutan retribusi pasar oleh Kantor Pengelolaan Pasar Raya Solok
3. Kurangnya fungsi koordinasi yang dilakukan dalam melakukan pemungutan retribusi yang menunggak.
4. Terjadinya tumpang tindih di Kantor Pengelolaan Pasar Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan wewenang saat berkoordinasi.
5. Kurangnya disiplin pegawai Kantor Pengelolaan Pasar saat melakukan pemungutan retribusi.
6. Kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi.
7. Masih kecilnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kota Solok.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas untuk mempersempit ruang lingkup masalah maka peneliti membatasi pada optimalisasi koordinasi atas tunggakan pembayaran retribusi pasar di Kota Solok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar atas tunggakan pembayaran retribusi pasar oleh pedagang di pasar raya Kota Solok?

2. Apa saja yang menjadi kendala bagi Kantor Pengelolaan Pasar Kota Solok dalam melakukan koordinasi atas tunggakan pembayaran retribusi pasar oleh pedagang pasar raya Kota Solok?
3. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Kantor Pengelolaan Pasar Solok dalam melakukan koordinasi atas tunggakan pembayaran retribusi pasar di Kota Solok?

E. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih terfokus pada koordinasi penanggulangan tunggakan retribusi pasar oleh pedagang di Kantor Pengelolaan Pasar Kota Solok.

F. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan Proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar Atas Tunggakan Pembayaran Retribusi Pasar di Kota Solok.
- b. Mengetahui apa-apa saja yang menjadi hambatan Kantor Pengelolaan Pasar Kota Solok dalam melakukan koordinasi atas tunggakan pembayaran retribusi pasar di Kota Solok.
- c. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Kantor Pengelolaan Pasar Solok dalam melakukan koordinasi atas tunggakan pembayaran retribusi pasar di Kota Solok.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Negara dalam mengembangkan konsep-konsep keuangan daerah. Memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis mengenai keuangan daerah khususnya di bidang retribusi pasar di Kota Solok.

2. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah Kota Solok dalam mengkoordinir penerimaan retribusi pasar dan dalam menuangkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar dan dalam menuangkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pada umumnya.
- 2) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami Upaya Kantor Pengelolaan Pasar Dalam Melakukan Koordinasi Atas Tunggakan Pembayaran Retribusi Pasar di Kota Solok.
- 3) Masukan bagi pemerintah daerah tentang pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar di Kota Solok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi Yang Dilakukan Oleh Kantor Pengelolaan Pasar Atas Tunggakan Pembayaran Retribusi Oleh Pedagang Pasar Raya Solok belum optimal. Karena masih banyak pedagang yang menunggak didalam melakukan pembayaran retribusi. Sehingga belum mampu membawa perubahan terhadap pencapaian target pendapatan retribusi pasar dalam tiga tahun terakhir. Sehingga masih kecilnya kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Kendala Kantor Pengelolaan Pasar Kota Solok Dalam Melakukan Koordinasi Atas Tunggakan Pembayaran Retribusi Pasar Oleh Pedagang Pasar Raya Solok adalah:

- a. Kendala internal

Kendala internal dalam melakukan koordinasi atas tunggakan retribusi pasar di Kota Solok adalah kurangnya tenaga kerja yang mengerti soal pencatatan akuntansi serta masih banyaknya pegawai Kantor Pengelolaan Pasar yang kurang disiplin dalam melakukan pemungutan, dan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Kantor pengelolaan Pasar dalam melakukan pemungutan, disamping itu

kurangnya disiplin pegawai kantor pengelolaan pasar saat melakukan pemungutan pada jam pemungutan. Sehingga membuat para pedagang di Pasar Raya Solok masih banyak yang menunggak.

b. Kendala eksternal

Kendala eksternal Kantor Pengelolaan Pasar dalam melakukan koordinasi atas tunggakan pembayaran retribusi pasar di Kota Solok adalah kurangnya kesadaran dari pedagang untuk membayar retribusi, sehingga menimbulkan masalah bagi pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya memungut retribusi pasar, karena mereka harus bolak-balik memungut retribusi ke pedagang yang menyebabkan mereka terlambat menyetorkan hasil pungutan retribusinya.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dalam melakukan koordinasi seharusnya harus memperhatikan atau berpedoman pada hal-hal seperti berikut:

Dikutip dari organisasi, koordinasi, wewenang delegasi dan penyusunan personalia organisasi (www.elearning.gunadarma.ac.id), adapun pedoman dalam Koordinasi adalah:

- a. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada pada setiap bagian.
- b. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.

- c. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
- d. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi intensional, dengan wujud saling memberi informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpang tindih tugas yang satu dengan yang lain.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Didalam melakukan koordinasi atas tunggakan pembayaran retribusi hendaknya ditingkatkan lagi. Koordinasi yang dilakukan seharusnya memberikan perubahan dan peningkatan terhadap hasil dari retribusi pasar. Sehingga retribusi pasar memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Solok.
2. Memberikan motivasi kerja kepada pegawai dengan cara memberikan imbalan kepada pegawai yang berprestasi baik berupa pujian atau promosi jabatan, penegasan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai, melakukan arahan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai dalam berbagai kesempatan seperti rapat dinas, rapat evaluasi dan kesempatan lainnya.

3. Memberikan sanksi yang tegas kepada pedagang yang sering menunggak dalam membayar retribusi pasar. Sehingga para pedagang yang sering menunggak memiliki kesadaran terhadap pembayaran retribusi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Amrullah,dkk. Jakarta: UI Press.

Devas, Nick. 1988. *Keuangan Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta : UI Press.

Dahlan Yakub .2001. *Kamus Sosiologi Antropologi*.Surabaya: Indah

Erly Suandy. 2002. *Peretribusian*, Jakarta : Salemba Empat.

Josef Riwo Kaho. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali.

J. S. Badudu dan Zein. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan.

Juli Panglima Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonom*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Lexy J. Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt Remaja Rosda Karya.

Profil Pasar Raya Solok. 2010.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kulaitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.

Soemitro, Rochmat, 1988, "Pajak dan Pembangunan", PT. Eresco, Bandung

Suparmoko, M. 1997. *Keuangan Negara (Dalam Teori dan Praktik)*. Yogyakarta : BPF

HAW, Widjaya. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdsada.

Yasril Yunus. dkk. 2006, *Kompilasi Materi Kuliah Organoisasi dan Management*. Program Studi IAN, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Syafnil Efendi. dkk. 2005. *Buku Ajar Sistem Pemerintahan Daerah*. Program studi PPKN, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

SKRIPSI

Arjanggih 2009. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Demak Pada Tahun 2006-2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang. 101 hal.(tidak dipublikasikan)

Mega 2012. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Pada Badan Narkotika Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negri Padang. 97 hal.(tidak dipublikasikan)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

UU No. 32 tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.